

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah 17 Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan sebelum pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan dengan saat pandemi covid-19. Pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi dan pajak daerah menurun pada saat pandemi covid-19 karena disebabkan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menimbulkan pengaruh bagi kehidupan sosial dan kegiatan bisnis berbagai sektor. Dan mengakibatkan kegiatan industri pariwisata dibatasi bahkan harus tutup sementara. Akibat kebijakan PPKM, sebagian besar pelaku industri pariwisata seperti pemilik kafe, pusat perbelanjaan/Mal, restoran, pusat cendera mata, pemilik penyewaan gedung serba guna dan dekorasi di Sumsel terancam bangkrut atau gulung tikar karena tidak ada pemasukan sementara biaya operasional seperti perawatan dan gaji tetap dikeluarkan setiap bulan.
2. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah daerah juga melakukan rasionalisasi belanja daerah, dimana belanja barang jasa dan belanja modal harus dikurangi sekurang-kurangnya 50 persen. Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan rasionalisasi sebesar 1,08% yang terfokus pada rasionalisasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sehingga tingkat rasio belanja modal tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun saat pandemi covid-19 namun malah meningkat di sisi belanja pegawai yang melonjak tinggi dibanding sebelum pandemi covid-19.
3. Implikasi dari Penelitian ini adalah hasil yang menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berimplikasi pada pendapatan asli daerah (PAD) yang cenderung

menurun dibandingkan sebelum pandemi covid-19 sehingga pemerintah daerah harus senantiasa untuk meningkatkan PAD. Pandemi covid-19 berimplikasi juga pada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga belanja modal yang dikeluarkan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana semakin rendah dibandingkan dengan belanja lainnya yang dikeluarkan daerah. Hal ini juga berimplikasi pada alokasi anggaran yang lebih memberatkan ke belanja-belanja lainnya seperti belanja pegawai dibandingkan untuk belanja modal bagi stimulasi ekonomi dan pembiayaan pelayanan dasar warga.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan cara pemerintah terus mengupayakan untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah dan terus meningkatkan pemungutan pendapatan asli daerah secara intensif dan aktif. Pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara riil seperti menggali potensi dengan wisata atau dengan pemanfaatan teknologi secara online. Di zaman teknologi yang sudah sangat canggih ini dapat dimanfaatkan media online dalam bekerja atau berkomunikasi dari rumah, yang dapat lebih mengefisienkan biaya/pengeluaran utilitas pemerintah daerah. Dengan begitu atas kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah, akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan maju.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Selatan dapat mengalokasikan dana-dana dengan baik ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti Pandemi covid-19 dengan menyiapkan perencanaan dan program yang lebih efisien dan efektif untuk pembangunan publik dibandingkan dengan anggaran yang bersifat operasional pegawai.